

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA *NON LICENSE*
(Studi Kasus di Nolandfood Surakarta)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ZAKARIA ARISTA

C100120169

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA *NON LICENSE*
(Studi Kasus di Nolandfood Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ZAKARIA ARISTA

C100120169

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA *NON LICENSE*
(Studi Kasus di Nolandfood Surakarta)

OLEH :




ZAKARIA ARISTA

C100120169

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 19 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

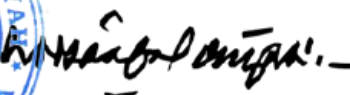
Dewan Penguji :

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, SH, M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina B. SH, M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,





(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oranglain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 November 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zakaria Arista', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Zakaria Arista)

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA *NON LICENSE* **(Studi Kasus di Nolandfood Surakarta)**

Abstrak

Daya konsumsi yang tinggi di masyarakat memicu naiknya jumlah permintaan akan suatu produk, hal ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan besar menjual produknya dalam bentuk waralaba guna menjangkau pemasaran yang lebih luas, namun tidak hanya perusahaan besar saja yang menjual produknya dalam bentuk waralaba, banyak dijumpai pula usaha mikro kecil dan menengah berusaha menjual produknya dalam bentuk waralaba, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan akan kelayakan sistem, manajemen dan perlindungan hukum akan produk tersebut, kurangnya pengetahuan dan literasi hukum menyebabkan ketidakpastian akan produk tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba harus memiliki syarat khusus untuk disebut sebagai waralaba, yaitu; ciri khas khusus, terbukti menguntungkan, memiliki standar yang terjamin, adanya dukungan terus-menerus, mudah diajarkan, terdaftar sebagai Hak kekayaan intelektual, dalam penjelasan diatas yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis perjanjian waralaba *non license* (Studi kasus Nolandfood Surakarta) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, dari wawancara pemilik Nolandfood sendiri serta mengumpulkan data dari studi kepustakaan dari berbagai buku, *website* dan riset langsung kepada lembaga yang berwenang dalam pencatatan perjanjian waralaba yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Penelitian termasuk ke dalam jenis kualitatif lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik, yang dimaksud disini adalah penelitian menggambarkan keadaan suatu peristiwa secara terperinci tentang proses waralaba Nolandfood, penelitian bersifat penelitian sosiologi hukum atau normatif-empiris, dengan cara meneliti sebuah sistem melalui pendekatan kepada pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebuah masalah dengan mengacu kepada rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis. Atas dasar latar belakang yang dikemukakan, penulis berusaha menjelaskan tentang sistematika dan pelaksanaan perjanjian waralaba dengan memperinci penjabarannya untuk menjelaskan isi objek dan peran subjek dalam perjanjian waralaba secara *de jure* atau berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dikomparasikan dengan perjanjian waralaba yang menjadi pokok penulisan skripsi, yaitu perjanjian waralaba yang dibuat oleh Nolandfood atau *de facto*, dari hasil komparasi tersebut dapat ditemukan sebuah jawaban dari rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk, kekuatan hukum, akibat hukum dari perjanjian waralaba yang dibuat oleh pihak Nolandfood, untuk selanjutnya bisa digunakan sebagai pedoman atau dasar masyarakat untuk mempertimbangkan keputusan sebelum membeli dan menandatangani sebuah perjanjian waralaba untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan hukum bilamana suatu saat muncul sengketa

Kata kunci : analisis perjanjian waralaba, perjanjian waralaba yang benar, perlindungan hukum *franchisee*, perjanjian Nolandfood

Abstract

High consumption power in society triggers an increase in the amount of demand for a product, this causes many large companies to sell their products in the form of franchises in order to reach a wider market, but not only large companies sell their products in the form of franchises, many are also found. Micro, small and medium enterprises try to sell their products in the form of a franchise, this raises many questions about the feasibility of the system, management and legal protection of these products, lack of knowledge and legal literacy causes uncertainty about these products, as stated in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, that a franchise must have special requirements to be called a franchise, namely; special characteristics, proven profitable, have guaranteed standards, continuous support, easy to teach, registered as intellectual property rights, in the explanation above which is the background of this thesis writing. In writing the thesis entitled "Analysis of the non-license franchise agreement (Case Study of Nolandfood Surakarta), the author uses data collection methods, from interviews with Nolandfood owners themselves and collecting data from literature studies from various books, websites and direct research to institutions authorized for recording. The franchise agreement, namely the Department of Industry and Manpower of Sukoharjo Regency, is included in the type of qualitative field (field research) and is descriptive and analytical in nature, what is meant here is that research describes the state of an event in detail about the Nolandfood franchise process, research is legal sociological research or normative -empirical, by examining a system through an approach to the parties concerned, with the intention of identifying and clarifying a problem by referring to the problem formulation that has been put forward by the author. On the basis of the stated background, the author tries to explain the systematics and implementation of the franchise agreement by detailing the prison terms to explain the contents of the object and the role of the subject in the franchise agreement de jure or based on the applicable laws and regulations to be compared with the franchise agreement which is the subject of writing. thesis, namely the franchise agreement made by Nolandfood or de facto, from the results of the comparison can be found an answer to the formulation of the problem, namely, what is the form, legal strength, legal consequences of the franchise agreement made by Nolandfood, which can then be used as a guide or the basis of society to consider the decision before buying and signing a franchise agreement to ensure legal certainty for legal protection should a dispute arise

Keywords : franchise agreement analysis, correct franchise agreement, franchisee legal protection, nolandfood agreement

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memicu tingginya konsumsi masyarakat akan sebuah kebutuhan, dengan ditandai banyaknya merek dagang yang berada di pasaran karena pengaruh media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan, dengan

tingginya permintaan akan sebuah produk maka pelaku usaha mulai menjadikan konsep waralaba sebagai sebuah strategi bisnis baru, dimana para pelaku bisnis ini menjual ide bisnis mereka dalam bentuk merk dagang, lisensi ataupun kemitraan. Istilah waralaba bermula semenjak praktek bisnis di Eropa, dimana para pemilik tanah yang diberikan hak oleh para raja untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan membayarkan sejumlah pajak kepada kerajaan atas tanah yang digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sistem tersebut hamper sama seperti *royalty fee*, atau yang kini disebut waralaba.¹ Pada tahun 1980 hingga 1990 sistem waralaba asing mulai masuk ke Indonesia seperti MC Donald, KFC dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter menyebabkan merosotnya jumlah perusahaan asing yang melakukan *franchise* di Indonesia karena turunnya nilai mata uang. Pada saat itu, menurut konsultan waralaba Amir Karamoy, pertumbuhan waralaba asing di Indonesia pada kurun waktu 1998 –2000 tercatat minus 86%.² Hingga pada tahun 2003 kondisi ekonomi dan politik mulai stabil dan geliat usaha franchisemulai kembali pesat. Di Indonesia sendiri tercatat ada 698 waralaba dengan jumlah gerai 24.400 yang terdiri dari 63% waralaba lokal serta 37% mancanegara. Dengan omzet mencapai Rp 172 triliun.³

Waralaba atau biasa disebut dengan *franchise* yaitu badan usaha atau perorangan (*franchisee*) yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki *franchisor*, dengan memberikan imbalan kepada pemberi waralaba berupa *franchisee fee* atau *royalty fee*,⁴ atas pemberian hak dan pengelolaan lisensi,⁵ berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa,⁶ atau dengan kata lain *franchise* adalah suatu sistem pendistribusian, di mana pihak pertama yaitu pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yaitu (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang atau jasa pada waktu dan area tertentu

¹ Rizal cavity M, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise* (Jakarta:Elex Media, 2007), hal.1.

² Lukman Hakim, *Info Lengkap Waralaba*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hal.42.

³ Muhammad Damar W, „RI Punya 689 Waralaba, Omzetnya Rp 127T”, <http://finance.detik.com/read/2016/09/05/202011/3291709/1036/ri-punya-698-waralaba-omzetnya-rp-172-t,diakses pada 22 Desember 2020 pukul 14.20 WIB>

⁴ Siti Najma, *Bisnis Syariah* dari Nol, Jakarta:Hikmah, 2007, hal.176

⁵ Peraturan Pemerintah No 16 tahun 1997 *tentang Waralaba* Pasal 1 ayat (1)

⁶ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 48

dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor.⁷ Pada era modern seperti saat ini, *franchise* dikatakan salah satu sistem bisnis yang sangat menguntungkan, selain untuk meminimalisir resiko kegagalan usaha juga dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. Dengan adanya *franchise* maka akan mendapatkan dukungan dan panduan dari pemilik usahadan sudah memiliki merek usaha yang dikenal oleh masyarakat. Pengembangan usaha dengan model *franchise* dapat mendorong berkembangnya spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, menumbuhkan kreatifitas dalam mengembangkan berusaha, sehingga pada dapat membuka akses pasar yang luas bagi Indonesia itu sendiri.⁸

Masalah mulai timbul pada akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya produk-produk baru yang muncul dengan mengatas namakan sebagai usaha yang berbentuk *franchise* dengan iming-iming modal minim dan keuntungan yang besar, namun jika ditinjau dari klausa perjanjian dan syarat sahnya suatu produk bisa disebut sebagai usaha waralaba, banyak produk-produk tersebut jauh memenuhi standard untuk disebut sebagai waralaba, sebagian besar dikarenakan belum mempunyai kekuatan hukum yang terdaftar, sehingga pemberian lisensi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik di lapangan penulis menemui sebuah restoran cepat saji yang cukup terkenal di kota Surakarta yaitu Nolandfood, yang sudah berdiri sebagai restoran cepat saji sejak tahun 2016 berbasis menjual makanan cepat saji berupa ayam goreng krispi dengan aneka saus kekinian, dengan jumlah permintaan produk yang semakin meningkat dari berbagai daerah menyebabkan Nolandfood berencana melebarkan bisnisnya dalam bentuk waralaba dengan menggandeng investor sebagai jalan pintas untuk mengembangkan usahanya. Nolandfood sebagai restoran cepat saji pada pelaksanaanya hanya terdaftar sebagai usaha kecil, mikro dan menengah dengan dikeluarkanya surat edaran keterangan usaha dari kecamatan setempat dan belum memiliki Hak atas kekayaan intelektual didalam produknya yang terdaftar, maupun Surat tanda pendaftaran waralaba, sehingga menimbulkan pertanyaan akan keabsahan perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh Nolandfood tersebut, layak atau sah

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal.622

⁸ M. Fuad et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 49.

jika disebut sebagai perjanjian waralaba, karena perjanjian tersebut tidak disertai pemberian lisensi yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat perjanjian waralaba tersebut telah dibuat dan disepakati bersama antara pemberi dan penerima waralaba, bahkan penerima waralaba telah menjalankan usaha selama 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian itu ditandatangani. Semakin menjamurnya sistem waralaba pada saat ini, menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terutama untuk penerima waralaba (*franchisee*), karena telah memberikan sejumlah *fee* kepada pemberi waralaba (*franchisor*) dengan harapan mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan, dapat dinikmati dengan aman, sah menurut Undang-undang, dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum antara kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Dari pernyataan di atas penulis tertarik mengkaji dan menganalisa sistem serta isi perjanjian waralaba Nolandfood (*de facto*) dan membandingkan dengan sistem perjanjian waralaba secara (*de jure*) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN WARALABA *NON LICENSE* (Studi Kasus di Nolandfood Surakarta)”**

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Metode Pendekatan adalah pola pikir yang dianjurkan oleh para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian dan melakukan penelitian.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif lapangan (*field*

⁹ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17

¹⁰ <https://rumusrumus.com/pendekatan-penelitian-contoh-dan-penjelasan/> diakses tanggal 25 Desember 2020, pukul 12.41 WIB

research) dan bersifat deskriptif kualitatif,¹¹ yang dimaksud disini adalah penelitian menggambarkan keadaan suatu peristiwa secara terperinci tentang proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian waralaba di Nolandfood, serta penjelasan sistematika perjanjian waralaba yang benar menurut undang-undang dari Dinas atau lembaga yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu, data primer, data sekunder. Sedangkan Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi di lapangan. Penelitian secara deskriptif kualitatif lebih dipilih penulis dalam metode analisa data karena penelitian ini merupakan visualisasi dari sebuah data yang sudah diperoleh ke dalam kalimat, Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud disini, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, yang berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori,¹² Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya,¹³ dengan menggunakan dasar logika induktif, yakni suatu bentuk pembuktian yang membuat generalisasi berdasarkan pendapat seseorang dalam hal ini pendapat dari penulis, dengan didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .2010 hal 9

¹² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2005.hal 6

¹³ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses 25 Desember 2020, Pukul 13.04 WIB

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian_melalui_induksi diakses 25 Desember 2020, Pukul 03.10 WIB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian, penulis membandingkan bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba di Nolandfood untuk dikomparasi dengan perjanjian waralaba secara yuridis (Sesuai Undang-Undang yang berlaku), untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi bagi *franchisor* apabila perjanjian waralaba tersebut tercipta, serta menggambarkan kepastian hukum bagi para mitra (*franchisee*) apabila terlanjur membeli produk waralaba Nolandfood. Dalam penulisan BAB III ini disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh penulis, yakni dengan menganalisis perjanjian waralaba berdasarkan Undang-undang dan penjelasan dari lembaga pemerintah terkait, yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan (*de jure*). Dikarenakan domisili penulis berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, proses pengumpulan data dari dinas terkait perjanjian waralaba didapatkan dari hasil studi berdasarkan surat izin riset dan pengumpulan data yang dikeluarkan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (terlampirkan). Proses pengumpulan data didapatkan dari Dinas perindustrian dan tenaga kerja serta Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, yang dulunya adalah satu kesatuan instansi dengan nama Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sukoharjo. Setelah mendapat penjelasan secara *de jure* dari tinjauan pustaka dan riset ke dinas terkait, maka penulis mengkomparasi hasil riset dengan keadaan perjanjian waralaba yang terjadi di lapangan (*de facto*) yang terjadi di restoran cepat saji Nolandfood sehingga tercipta sebuah titik terang dan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang dibuat penulis. Adapun perlindungan hukum mitra dari Nolandfood dijelaskan dengan cara menganalisis Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meneliti hak dan tanggung jawab *franchisee* atau mitra yang ada didalam perjanjian waralaba.

Dalam BAB III ini penulis membagi menjadi beberapa sub BAB agar sistematika penulisan bisa teratur sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, dengan penjelasan sub BAB yang diuraikan sebagai berikut; analisis perjanjian waralaba *non license* di nolandfood surakarta perjanjian waralaba secara *de jure* pengertian perjanjian waralaba secara *de jure* pelaksanaan perjanjian waralaba *de jure* perjanjian waralaba yang terjadi di

nolandfood (*de facto*) menganalisis isi perjanjian waralaba di nolandfood *de facto*.(terlampirkan) menganalisis kekuatan hukum perjanjian waralaba di nolandfood akibat dan sanksi hukum atas terciptanya perjanjian waralaba di nolandfood akibat hukum dan sanksi bagi *franchisor* dan *franchisee* atas terciptanya perjanjian waralaba di nolandfood perlindungan hukum mitra nolandfood.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa perjanjian waralaba secara *de jure* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa perjanjian waralaba secara *de facto* dengan meninjau keadaan langsung dilapangan yaitu perjanjian waralaba yang dibuat oleh Nolandfood dapat disimpulkan, bahwa perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh mitra Nolandfood tersebut sah-sah saja secara hukum perjanjian, dikarenakan sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni, kecakapan, kesepakatan, adanya klausa yang halal, namun belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna, hal ini disebabkan sebab perjanjian dibuat dan ditandatangani sendiri dan tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang. Perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara pihak walaupun belum sempurna, akan tetapi belum bisa disebut dengan perjanjian waralaba karena ada unsur-unsur formil yang belum terpenuhi seperti, Hak atas kekayaan intelektual yang terkandung didalam sebuah objek yang diperjanjikan, belum terdapat Surat Tanda Pendaftaran Waralaban atas pendaftaran prospektus perjanjian yang dilakukan oleh *franchisor*, serta belum adanya Surat Tanda Pendaftaran Waralaban atas pendaftaran perjanjian waralaba yang didaftarkan oleh *franchisee*. Dapat disimpulkan perjanjian waralaba atau kemitraan tersebut hanya berbentuk perjanjian formil pada umumnya, berisi tentang perjanjian untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang secara khusus mengatur tentang tatacara dan ciri khas khusus milik Nolandfood, dan perlu ditegaskan lagi perjanjian ini bukan merupakan perjanjian waralaba, bahkan sebelum perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dengan didaftarkanya secara prospektus, hal ini dikarenakan pokok utama dari perjanjian waralaba

adalah penyerahan lisensi atas suatu hak kekayaan yang terdaftar, yang jika dilihat dari hasil analisa Nolandfood belum mempunyainya.

4.2 Saran

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan saran atau pedoman bagi pelaku usaha di luar sana dalam menjual atau membeli suatu produk waralaba. Saran bagi *franchisor* sebelum menjual produknya ke bentuk waralaba sebaiknya mendaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan hukum atas Hak kekayaan intelektual yang terkandung didalam produknya, hal ini menjadi sangat dasar bagi *franchisor* dikarenakan lisensi suatu produk tergantung kepada Hak kekayaan intelektual suatu produk serta merupakan salah satu syarat utama dalam mendaftarkan prospektus penawaran perjanjian waralaba, sehingga kerahasiaan dan ciri khas produknya dapat terjaga dan tidak disalah gunakan oleh orang lain. Sementara pesan untuk *franchisee* adalah memilih secara hati-hati dan tidak asal mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk waralaba yang belum menjamin perlindungan hukum kepada konsumen, sebaiknya sebelum membeli suatu produk waralaba *franchisee* diwajibkan untuk menanyakan hal-hal pokok yang menjadi syarat sah nya suatu perjanjian waralaba yang harus dipenuhi *franchisor* guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum semua pihak akan tetapi juga menjaga kenyamanan bersama guna mencapai tujuan utama yang diinginkan yaitu kesuksesan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- M Cavary Rizal. 2007, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise*, Jakarta:Elex Media,.
- Hakim Lukman. 2008, *Info Lengkap Waralaba*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Damar W Muhammad. 2007, RI Punya 689 Waralaba, Omzetnya Rp 127T", Siti Najma, *Bisnis Syariah* dari Nol, Jakarta:Hikmah.
- Widjaja Gunawan. 2020, *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wardi Muslich Ahmad. 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Fuad et al M. 2006 , *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainudin Ali. 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

<https://rumusrumus.com/pendekatan-penelitian-contoh-dan-penjelasan/>
diakses tanggal 25 Desember 2020, pukul 12.41 WIB

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses 25 Desember 2020, Pukul 13.04 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian_melalui_induksi diakses 25 Desember 2020, Pukul 03.10 WIB

<http://finance.detik.com/read/2016/09/05/202011/3291709/1036/ri-punya-698-waralaba-omzetnya-rp-172-t>, diakses pada 22 Desember 2020 pukul 14.20 WIB

Peraturan Pemerintah No 16 tahun 1997 *tentang Waralaba* Pasal 1 ayat (1)